

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penanganannya di Daerah Tertinggal

People with Social Welfare Problem and Its Solving in Underdeveloped Region

Murdiyanto

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI Yogyakarta, Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Nitipuran, Yogyakarta.
Email: <murdiyanto471@yahoo.com>. Diterima 23 April 2014, direvisi 7 Juli 2014, disetujui 26 Agustus 2014

Abstract

This research is done to get an objective information on social welfare problems and its solving in underdeveloped region. Research location determined purposively in Baramamase Village, Walenrang Underdistrict, Luwu Regency, South Celebes Province, under the consideration that the region has high prevalency of social problems among other regions. Data gathered through interview, observation, and documentary analysis. The result shows that social problems in Baramamase Village are uninhabitable houses, poor families, flood victims natural disaster, economic and social vulnerable women, and neglected children. Initial problem solving that is done are mapping and finalizing data, then followed by treatment. It can be concluded that social problems in Baramamase Village is caused by poverty factor. For the social problem solving, especially poverty in underdeveloped region that have not been adequately covered by the program, it is recommended that the program should be implemented comprehensively by the government, private sector, individual, and group. The participation of those institution should refer to their respective competencies, so that no overlap policies among committed institutions happen in the implementation of the program.

Keywords:

Social Problems Solving-Underdeveloped Region-Baramamase Village

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi objektif tentang kondisi PMKS dan upaya penanganannya di daerah tertinggal. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu di Desa Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki PMKS relatif lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain yang sama-sama merupakan desa tertinggal. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis permasalahan sosial yang ada di Desa Baramamase sebagian besar meliputi: rumah tidak layak huni, keluarga fakir miskin, korban bencana alam (khususnya korban bencana banjir), wanita rawan sosial ekonomi, dan anak terlantar. Tindak awal yang dilakukan untuk penanganan PMKS, yaitu pemetaan atau pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, kemudian dilakukan tindakan penanganan. Dapat disimpulkan bahwa jenis PMKS di Desa Baramamase sebagian besar disebabkan oleh faktor kemiskinan. Dalam upaya penanganan masalah sosial dan khususnya kemiskinan di daerah tertinggal yang belum terjangkau oleh pelayanan sosial secara memadai, disarankan agar dalam penanganannya dilakukan secara komprehensif dari berbagai lembaga baik pemerintah, swasta, individu, maupun kelompok. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut disesuaikan dengan kewenangan masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antalembaga yang terlibat.

Kata kunci:

PMKS–Penanganan-Daerah Tertinggal-Desa Baramamase

A. Pendahuluan

Dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial pada realitanya telah memperlihatkan berbagai kemajuan, khususnya bagi masyarakat yang tergolong tidak beruntung dan dalam kondisi rentan sosial ekonomi yang lebih populer disebut sebagai penyandang masalah kese-

jahteraan sosial (PMKS), serta masyarakat fakir miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat tersebut tercermin dalam indikator sosial, antara lain: jangkauan pelayanan sosial disatu pihak dan penurunan jumlah permasalahan sosial, masyarakat miskin, kemandirian, dan

keberfungsian sosial penyandang masalah. Hal tersebut tercermin dalam tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jatidiri bangsa Indonesia (Sugiyanto: 2007).

Pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui indikator sosial, antara lain mengenai peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat fakir miskin sebagai sumberdaya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Soetomo, 1995). Pada realitasnya, masih banyak PMKS yang belum terjangkau oleh pelayanan sosial secara memadai, lebih terfokus lagi pada daerah yang dikategorikan tertinggal. Sebagai salah satu ciri dari daerah tertinggal adalah begitu banyaknya PMKS, tetapi tidak sebanding dengan jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di daerah tersebut.

Atas dasar kondisi permasalahan sosial di daerah tertinggal tersebut, Kementerian Sosial telah berhasil menyusun program prioritas sebagai upaya percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan keadilan di daerah tertinggal. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 06B/HUK/2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 100 desa pada 50 kabupaten daerah tertinggal. Keputusan Menteri Sosial tersebut didasarkan kepada 199 daerah tertinggal sesuai dengan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dengan Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 dan 183 daerah (kabupaten) tertinggal sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Berbagai daerah yang dapat dikategorikan tertinggal antara lain: Jawa dan Bali 9 daerah, Kalimantan 16, Nusa Tenggara 28, Maluku 15, Papua 35, Sumatera 46, dan Sulawesi 34 daerah. Dari 183 daerah yang dikategorikan tertinggal apabila dibagi berdasarkan cakupan wilayahnya, yakni daerah yang berada di perbatasan dengan negara lain sebanyak 27 kabupaten, dan daerah termasuk non perbatasan sebanyak 156 kabupaten. Daerah yang dikategorikan tertinggal telah ditetapkan berdasarkan beberapa penilai-

an, antara lain masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, perekonomian masyarakatnya, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial di daerah tertinggal, dianggap perlu diketahui secara langsung mengenai deskripsi PMKS dan upaya penanganannya di daerah tertinggal, maka penelitian ini dilakukan.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran PMKS dan upaya penanganannya di daerah tertinggal? Tujuan adalah diketahuinya kondisi PMKS dan upaya penanganannya di daerah tertinggal, sedangkan manfaat yang diharapkan adalah sebagai salah satu bahan masukan bagi Kementerian Sosial dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam penyusunan kebijakan, terutama mengenai penanganan PMKS, dan dapat dipakai untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang permasalahan sosial dan upaya penanganan di daerah tertinggal.

B. Kajian Teori

1. Karakteristik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat, yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar (Pusdatin Kesos: 2007).

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan/ keteringgalan dan kondisi atau perubahan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan, seperti bencana alam maupun bencana sosial. Jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial dibagi menjadi 22 jenis (Pusdatin Kesos: 2007), tetapi yang ada di daerah penelitian hanya 9

jenis PMKS, yaitu: Anak balita terlantar, anak yang berusia 0–4 tahun yang karena sebab tertentu, orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Ciri-ciri anak balita terlantar meliputi: Anak usia 0–4 tahun, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, atau balita yang tidak pernah mendapat ASI atau susu pengganti, atau balita yang tidak mendapat makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) dua kali satu minggu, balita yang tidak mempunyai sandang yang layak sesuai dengan kebutuhannya, yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orangtuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya, serta apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke puskesmas atau rumah sakit).

Anak terlantar, yaitu anak berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu, orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Ciri-ciri anak terlantar antara lain: anak usia 5–18 tahun, anak yatim, piatu, yatim piatu, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Anak nakal, merupakan anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarga dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum. Ciri-cirinya adalah anak usia lima sampai kurang dari 18 tahun dan belum menikah, tidak ada hubungan harmonis antara anak dengan orangtuanya, atau dengan anggota keluarga lainnya, tidak mengenal atau tidak mau tahu tatakrama etika pergaulan umum, dan melakukan perbuatan (secara berulang) yang menyimpang atau melanggar norma masyarakat.

Wanita rawan sosial ekonomi yaitu seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda, dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dengan ciri-ciri: wanita usia 15–59 tahun, berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan fisik minimum (sesuai kriteria fakir miskin), tingkat pendidikan rendah (umumnya tidak tamat, maksimal pendidikan dasar), istri yang ditinggal suami tanpa batas waktu dan tidak dapat mencari nafkah, serta sakit sehingga tidak mampu bekerja.

Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Ciri-cirinya antara lain: usia 60 tahun atau lebih (laki-laki dan perempuan), tamat SD atau kurang, makan hanya $< 2 \times$ per hari, hanya mampu makan makanan berprotein tinggi (4 sehat 5 sempurna) $< 4 \times$ per minggu, pakaian yang dimiliki < 4 stel, jika sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan, dan ada atau tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya.

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani, rohani, dan sosial secara layak. Keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber matapencaharian, dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau yang layak bagi kemanusiaan, ataupun seseorang dan keluarga yang mempunyai sumber matapencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. Ciri-cirinya: penghasilan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan pada umumnya rendah dan tidak ada keterampilan tambahan, derajat kesehatan dan gizi rendah, tidak memiliki tempat tinggal layak huni, termasuk tidak memiliki MCK, kepemilikan harta sangat terbatas jumlah atau nilainya, hubungan sosial terbatas, belum banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, dan akses informasi terbatas.

Keluarga berumah tidak layak huni merupakan keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan, maupun sosial. Ciri-cirinya adalah kondisi rumah (luas lantai perkapita kota < 4 m², desa < 10 m², sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas, tidak mempunyai akses MCK, bahan bangunan tidak permanen atau atap dinding dari bambu, rumbia, tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara, tidak memiliki pembagian ruangan, lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap, letak rumah tidak teratur dan berdempetan, serta dalam kondisi rusak). Kondisi lingkungan kumuh dan becek, saluran pembuangan air tidak memenuhi standar, dan jalan setapak tidak teratur. Kondisi keluarga, kebanyakan dari keluarga miskin dan kesadaran untuk ikutserta memiliki dan memelihara lingkungan, pada umumnya rendah.

Korban bencana alam adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja) (Profil Pembangunan Kesejahteraan Sosial: 2008).

2. Daerah Tertinggal

Daerah dianggap tertinggal berdasarkan beberapa penilaian, antara lain masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Menurut Kanbur dan Venables, dalam *Spatial Inequality and Development* (dalam Novri Susan, 2010), gejala-gejala dari ketimpangan wilayah di antaranya adalah masih

rendahnya kualitas sumber daya manusia perdesaan, jeleknya fasilitas infrastruktur, aktivitas perbankan dan kemampuan keuangan lokal yang rendah, kebijakan pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam semata, tidak tersedianya lapangan kerja berbasis karakter sosial ekonomi lokal, kurangnya optimalisasi fungsi kelembagaan sosial yang ada, serta lemahnya aksesibilitas masyarakat rentan terhadap pelayanan sosial yang ada.

Penetapan daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan relatif berdasarkan pada perhitungan enam kriteria dasar dan 27 indikator utama yaitu *perekonomian masyarakat*, dengan indikator utama persentase keluarga miskin dan konsumsi perkapita; *sumber daya manusia*, dengan indikator utama angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf; *prasarana (infrastruktur)* dengan indikator utama jumlah jalan dengan permukaan terluas aspal, beton, jalan diperkeras, jalan tanah, persentase pengguna listrik, telepon dan air bersih, jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen, jumlah prasarana kesehatan per 1000 penduduk, jumlah dokter per 1000 penduduk, jumlah SD-SMP per 1000 penduduk; *kemampuan keuangan daerah* dengan indikator utama celah fiskal; aksesibilitas dengan indikator utama rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan lebih besar dari 5 km; dan *karakteristik daerah* dengan indikator utama persentase desa rawan gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya, persentase desa di kawasan lindung, desa berlahan kritis, dan desa rawan konflik satu tahun terakhir.

Di Indonesia terdapat 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Daftar kabupaten tersebut telah dimasukkan dalam RPJMN 2010-2014 sebagai target pembangunan daerah tertinggal. Di samping itu, guna menyokong percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam lima tahun terakhir ini, antara lain: Peningkatan jumlah alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah tertinggal pada tahun 2004, dari sebesar 19 persen dan meningkat

menjadi sekitar 55 persen di tahun 2008; Pemerintah, diwakili Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), terus bekerja keras untuk segera mengentaskan jumlah daerah tertinggal yang saat ini masih cukup banyak, yakni terdapat 183 kabupaten. Dari data tersebut, jumlah desa yang tertinggal sebanyak 26.746 desa atau 35,47 persen dari total 75.410 desa yang ada di Indonesia. Untuk mempercepat proses pengentasan daerah-daerah tertinggal, terjadi pergeseran perubahan paradigma pembangunan yang dilakukan dari sebelumnya pembangunan berbasis kawasan, menjadi pembangunan berbasis perdesaan (*base on village*) di awal tahun 2010. Pentingnya membangun desa ini dilandasi karena alasan desa merupakan modal dasar pembangunan serta solusi bagi perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, juga sebagai basis perubahan pembangunan nasional untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antarwilayah (Soetomo, 1992). Semakin desa maju, sejahtera, dan sejajar dengan kota ataupun desa yang sudah maju terlebih dahulu, maka secara otomatis negara juga akan ikut berkembang dan maju (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal).

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memperoleh informasi ataupun gambaran secara objektif mengenai kondisi PMKS dan upaya penanganannya di daerah tertinggal. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan ataupun melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dikembangkan dengan memberikan penafsiran yang adekuat terhadap fakta-fakta yang ditemukan (Suharsimi Arikunto: 1992).

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu desa yang memiliki PMKS relatif lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain. Menurut data Pusdatin (2005) di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat dua kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Luwu.

Kabupaten Luwu apabila dilihat dari jumlah PMKS ternyata lebih banyak, dimana terdapat lima desa yang dikategorikan tertinggal. Dari kelima desa tersebut, dua diantaranya yaitu Desa Larompong dan Desa Padang Subur karena kondisinya sudah berkembang, dan statusnya sudah berubah menjadi kelurahan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai desa tertinggal. Sedangkan dua desa lainnya yaitu Desa Ilan Batu Uru dan Ilan Batu termasuk daerah yang sulit dijangkau karena berada di atas perbukitan yang merupakan daerah tujuan program transmigrasi. Daerah tersebut kalau musim kemarau dapat dijangkau dengan transportasi seperti sepeda motor, tetapi apabila musim hujan hanya dapat dijangkau dengan jalan kaki. Lokasi penelitian ditentukan di Desa Baramamase Kecamatan Walenrang.

Sumber informasi dalam penelitian ini meliputi: kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan sebagian warga masyarakat Desa Baramamase. Dari berbagai informan tersebut, akan dapat saling melengkapi di dalam memberikan data maupun pernyataan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini, sehingga diperoleh hasil secara maksimal. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain wawancara, karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara mendalam adalah wawancara, sehingga jenis instrumen pengumpul data bersifat terbuka, yaitu memberi kesempatan kepada informan untuk memberikan informasi secara luas mengenai berbagai hal yang ditanyakan berdasarkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang mereka miliki. Observasi, teknik ini dipergunakan untuk mengetahui secara objektif mengenai situasi dan kondisi kehidupan warga masyarakat di daerah tertinggal (Desa Baramamase), sehingga dapat melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui teknik wawancara. Telaah dokumen, teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berbagai arsip, berbagai dokumen, monografi desa, dan laporan tahunan

yang berhubungan dengan kegiatan aparat desa dalam upaya penanganan permasalahan sosial yang ada di lingkungannya. Sedangkan analisis data yang digunakan (Sutrisno Hadi: 1983) adalah kualitatif dan dideskripsikan menggunakan narasi, dengan alasan karena lebih mendasari pada penafsiran data dan informasi dalam *setting* sosial alamiah sebagaimana adanya.

D. Hasil Penelitian: Penanganan Kesejahteraan Sosial di Daerah Tertinggal

1. Gambaran Umum Desa Baramamase

Desa Baramamase merupakan salah satu desa di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan yang dibagi menjadi 6 dusun, 6 RW, dan 6 RT. Batas wilayah Desa Baramamase terdiri dari: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaliba Mamase, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tombang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jaya Kota Administratif Palopo, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanete. Jarak Desa Baramamase dengan ibukota kecamatan kurang lebih sejauh lima kilometer, dengan ibukota kabupaten 85 kilometer, dan dengan ibukota provinsi 367 kilometer. Akses dari ibukota provinsi dapat dijangkau melalui transportasi darat seperti bus (Makassar-Palopo) ataupun travel dengan waktu tempuh kurang lebih selama sembilan jam, kemudian dilanjutkan ke Desa Baramamase kurang lebih memakan waktu 1,5 jam perjalanan darat.

Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Baramamase sebanyak 3.473 jiwa, terdiri dari 1.754 orang laki-laki dan 1.719 perempuan. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 631 KK, terdiri dari 536 KK (84,94 persen) laki-laki dan 95 KK (15,06 persen) perempuan. Sedangkan jumlah penduduk menurut umur dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Desa Baramamase pada tahun 2011, yaitu besarnya tanggungan yang menjadi beban bagi penduduk usia produktif (15–60 tahun) sebanyak 2.126 orang (61,22 persen) menanggung beban yang meliputi usia muda/usia sekolah (0–14 tahun) sebanyak 1.005 anak (28,93 persen), dan Lanjut Usia (LU) yang berusia 60 tahun ke atas seban-

yak 342 orang (9,85 persen). Dengan demikian, rasio ketergantungan dapat dirinci menjadi rasio ketergantungan anak (*child dependency ratio*) sebesar 47 (100 orang usia produktif menanggung beban sebanyak 47 anak usia muda/usia sekolah), dan rasio ketergantungan Lanjut Usia (*old dependency ratio*) sebesar 16 (100 orang usia produktif menanggung beban sebanyak 16 orang lanjut usia).

Tabel 1.

Distribusi Frekuensi Penduduk menurut Umur

No	Umur	f	persen
1	0 – 4 tahun	228	6,56
2	5 – 9 tahun	378	10,88
3	10 – 14 tahun	399	11,49
4	15 – 19 tahun	356	10,25
5	20 – 24 tahun	270	7,77
6	25 – 29 tahun	257	7,40
7	30 – 34 tahun	256	7,37
8	35 – 39 tahun	254	7,32
9	40 – 44 tahun	222	6,39
10	45 – 49 tahun	178	5,13
11	50 – 54 tahun	174	5,01
12	55 – 59 tahun	159	4,58
13	60 – 64 tahun	129	3,71
14	< 65 tahun	213	6,13
Jumlah		3.473	100,00

Sumber: Data Monografi Desa Baramamase (2011)

Dengan melihat kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggungan penduduk berusia produktif cukup berat, mengingat bahwa daerah yang dikategorikan tertinggal mengalami kesulitan di dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, karena sebagian besar penduduknya dapat dikategorikan termasuk keluarga fakir miskin, dimana untuk Desa Baramamase ini sebanyak 76 orang (25,85 persen), wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 31 orang (10,54 persen), dan sebagian besar berpenghuni di rumah tak layak huni sebanyak 91 orang (30,95 persen). Mengenai tingkat pendidikan penduduk Baramamase, dapat dilihat dalam Tabel 2.

Suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal apabila memiliki beberapa kriteria, salah satunya adalah tingkat pendidikan penduduk rendah. Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Baramamase tidak berpendidikan (tidak sekolah), yaitu sebanyak 466 orang (61,80 persen). Pada umumnya

mereka tidak sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: orangtua tidak mampu (miskin), tidak ada sarana pendidikan (kalaupun ada terletak jauh dari tempat tinggal), infrastruktur yang rusak ataupun sulit dijangkau, dan motivasi belajar yang kurang. Hal ini sering dijumpai anak kecil yang bekerja membantu orangtuanya baik di sawah, perkebunan/pekarangan, perikanan, maupun di pasar. Mereka senang dan merasa bangga apabila dapat membantu meringankan beban orangtuanya.

Tabel 2.
Distribusi Frekuensi Penduduk menurut
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	f	persen
1	Tidak sekolah	466	61,80
2	Sekolah Dasar	187	24,80
3	Sekolah Menengah Pertama	68	9,02
4	Sekolah Menengah Atas	18	2,39
5	Diploma III	14	1,86
6	Diploma IV ataupun S1	1	0,13
	Jumlah	754	100,00

Sumber: Data Monografi Desa Baramamase (2011)

Penduduk yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 187 orang (24,80 persen), baik bagi mereka yang sudah lulus sampai memperoleh sertifikat (ijasah) maupun mereka yang tidak sampai lulus SD (*dropout*). Perlu diketahui bahwa di Desa Baramamase terdapat sebuah gedung sekolah dasar, tetapi siswanya sebagian besar justru dari daerah lain. Hal ini terlihat pada pagi hari, dimana para siswa berangkat ke sekolah dengan jalan kaki secara bersama-sama, tetapi ada juga sebagian siswa berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda, sebagian siswa diantar oleh orangtua maupun saudaranya dengan mengendarai sepeda motor dua siswa sekaligus, hal ini mengandung resiko kecelakaan yang cukup tinggi.

Penduduk Desa Baramamase berpendidikan di atas Sekolah Dasar, tetapi persentasenya cukup kecil. Penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 60 orang (9,02 persen), Sekolah Menengah Atas 18 orang (2,39 persen), Diploma III sebanyak 14 (1,86 persen), dan Diploma IV ataupun Sarjana (S1) sebanyak 1 orang (0,13 persen). Apabila dilihat dari segi sarana pendidikan yang ada di

Desa Baramamase dapat dikategorikan cukup memadai, karena di samping terdapat satu sarana pendidikan Sekolah Dasar juga ada satu SMP dan SMA. Matapencaharian penduduk Desa Baramamase dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Distribusi Frekuensi Penduduk
menurut Matapencaharian

No	Jenis Matapencaharian	f	persen
1	PNS	12	1,20
2	ABRI	3	0,30
3	Petani	307	30,61
4	Buruh	681	67,89
	Jumlah	1.003	100,00

Sumber: Data Monografi Desa Baramamase (2011)

Potensi Desa Baramamase yang dimiliki antara lain meliputi sumber daya alam, yaitu berupa persawahan. Daerah ini cocok untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, karena di samping memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup baik juga masalah pengairan mudah diperoleh. Bahkan pada musim hujan tidak jarang sebagai daerah langganan terkena banjir, karena terletak di pinggir sungai yang setiap tahun tidak lepas dari banjir yang berhulu pada Sungai Batang di pegunungan Tana Toraja. Tabel 3 menunjukkan bahwa, sebagian besar (67,89 persen) atau sebanyak 681 orang bermatapencaharian sebagai buruh, baik buruh tani maupun buruh bangunan. Pada saat tidak memperoleh pekerjaan, maka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak menutup kemungkinan dan bahkan sering mereka lakukan bekerja sebagai buruh serabutan, yaitu bekerja apa saja yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani sebanyak 307 orang (30,61 persen), yaitu meliputi petani dengan tanah milik sendiri dan petani pengolah sawah milik orang lain maupun pengolah tanah dengan sistim sewa. Petani yang memiliki tanah sendiri, apabila tenaga untuk mengolah tanah dianggap kurang, seringkali mereka memanfaatkan tenaga buruh tani terutama pada saat tanam dan panen. Sedangkan penduduk yang lain bermatapenca-

harian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 orang (1,20 persen) dan sebagai anggota ABRI sebanyak 3 orang (0,30 persen). Kecilnya persentase kedua matapencaharian tersebut disebabkan karena bagi mereka yang memiliki potensi untuk berkembang sebagian besar mengadu nasib ke daerah lain, khususnya di kota-kota besar seperti Makassar, Manado, Surabaya, dan Jakarta.

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan hasil identifikasi, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.
Distribusi Frekuensi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Jenis PMKS	f	persen
1	Balita terlantar	5	1,70
2	Anak terlantar	18	6,12
3	Anak nakal	5	1,70
4	Wanita rawan sosial ekonomi	31	10,54
5	Lanjut usia terlantar	13	4,42
6	Penyandang cacat	12	4,08
7	Keluarga fakir miskin	76	25,85
8	Rumah tak layak huni	91	30,95
9	Korban bencana alam (banjir)	43	14,64
	Jumlah	294	100,00

Sumber: Hasil wawancara tahun 2011

Di lingkungan Desa Baramamase, yang termasuk dalam kategori anak balita terlantar ada sebanyak 5 anak (1,70 persen) baik secara fisik, psikis, maupun sosialnya. Keterlantaran anak yang ada di daerah ini terutama dalam segi tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, yaitu kurang memperoleh asupan makan bergizi seperti makanan yang mengandung unsur empat sehat lima sempurna. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga dalam kondisi miskin, sehingga tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan dasar anak yang berupa makanan bergizi. Dengan demikian asupan makan yang diberikan kepada anak hanya sekedar saja asal dapat makan tanpa memperhatikan kandungan gizi di dalamnya. Kehidupan di desa dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk makan setiap harinya memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar rumah, seperti: ketela, kates, pisang, bayam, kacang-kacangan, dan

lain sebagainya.

Kondisi ekonomi keluarga miskin khususnya di daerah tertinggal sangat terbatas, dengan demikian apabila sewaktu-waktu anak mengalami gangguan kesehatan atau sakit pada umumnya keluarga tidak mampu mencari obat ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, ataupun dokter. Biasanya mereka hanya mampu mencari obat yang dijual di warung terdekat ataupun sekedar dicarikan obat dari tanaman di sekitar rumahnya. Apabila sakitnya dirasa parah dalam arti sudah beberapa hari penyakitnya tidak sembuh-sembuh, baru pihak keluarga berusaha membawa anak ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat.

Sebagian besar anak terlantar yang ada di Desa Baramamase adalah termasuk dalam kategori anak yatim, yaitu anak yang ditinggal oleh salah satu orangtuanya (ayah) baik karena telah meninggal dunia maupun disebabkan karena terjadinya perceraian. Di samping karena kondisi rumah tangga yang tidak utuh lagi, anak terlantar di desa ini juga disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang tergolong tidak mampu atau fakir miskin. Dengan kondisi yang serba kekurangan, wajar apabila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak baik secara fisik, psikis, maupun sosialnya. Hal inilah yang menimbulkan keterlantaran anak dalam keluarga sehingga mengganggu tumbuh-kembang anak secara wajar.

Warga masyarakat Desa Baramamase yang termasuk dalam kategori anak nakal ada sebanyak 5 anak (1,70 persen), sebagian besar hanya sebatas tidak patuh terhadap perintah orangtua ataupun sering membolos sekolah. Ada juga anak yang kadangkala bertengkar ataupun berkelahi dengan teman sebayanya, tetapi hanyalah sebuah kasuistik saja dan bukan merupakan kebiasaan anak. Anak menjadi nakal terutama disebabkan karena kondisi kehidupan keluarga yang tidak mendukung terhadap tumbuh-kembang anak, antara lain keluarga dalam kondisi *broken home*, sering terjadi percerkocokan, perceraian, dan hubungan antara ayah dan ibu bahkan dengan anggota keluarga tidak harmonis lagi. Dengan kondisi yang demikian, wajar apabila anak-anak tidak krasan atau tidak tahan apabila berlama-lama berada di rumah, mereka

akan lebih senang apabila dapat bergabung dengan teman-teman yang mengalami nasib sama, sehingga untuk melampiaskan perasaan mereka sering berbuat keonaran di lingkungan keluarga dan mengganggu ketenteraman warga masyarakat.

Wanita rawan sosial ekonomi, merupakan wanita dewasa yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena ditinggal suami atau karena yang lain. Sebelum ditinggal suami, mereka menggantungkan hidupnya bersama anak-anak terhadap suaminya dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Setelah ditinggal suami, mereka tidak banyak berkutik dalam mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anak-anaknya, sehingga harus bekerja keras untuk mencari pekerjaan atau matapencaharian dalam upaya mencukupi kebutuhan fisik secara minimal. Mereka sebetulnya tidak siap menjadi kepala rumahtangga yang harus menanggung beban kehidupan seluruh anggota keluarganya, apalagi tidak didukung pula oleh adanya keterampilan yang dimiliki secara memadai untuk memperoleh penghasilan. Jenis pekerjaan yang mereka peroleh sifatnya informal, seperti: membuka warung secara kecil-kecilan ataupun berjualan di pasar, menjadi pembantu rumahtangga, tenaga pencuci pakaian dan menyeterika, pengasuh bayi ataupun merawat orang yang sudah tua (lansia), jualan sayuran dengan berkeliling kampung, dan lain sebagainya.

Di samping tidak memiliki bekal keterampilan secara memadai, mereka juga hanya berpendidikan rendah bahkan banyak pula yang tidak berpendidikan sama sekali (tidak sekolah), walaupun ada sebagian kecil yang pernah mengenyam bangku sekolah tetapi tidak sampai tamat sekolah dasar. Hal ini tercermin pada tabel 2 di atas (jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan), dimana sebagian besar penduduk Desa Baramamase hanya berpendidikan rendah (86,60 persen) yaitu meliputi tidak berpendidikan sebanyak 466 orang (61,80 persen), dan berpendidikan sekolah dasar sebanyak 187 orang (24,80 persen).

Di samping tingkat pendidikan yang rendah, para lanjut usia terlantar di desa ini juga hanya mampu makan sehari sebanyak dua kali dan

kurang memenuhi standar makanan berprotein bagi para lanjut usia (4 sehat 5 sempurna). Hal ini terjadi karena para lanjut usia terlantar hidup dalam lingkungan keluarga dalam kondisi tidak mampu atau keluarga fakir miskin, sehingga keluarga kurang memperhatikan terhadap kebutuhan dasar para lanjut usia baik secara fisik, psikis, maupun sosialnya. Selain itu jumlah pakaian yang dimilikipun sangat terbatas barangkali cuma sampai empat stel pakaian, hal inipun dapat dimaklumi karena para lanjut usia pada umumnya tidak mau memiliki pakaian secara berlebihan, mereka lebih senang jika memiliki uang yang cukup untuk disimpan ataupun diberikan kepada anak dan cucunya.

Pada umumnya para orang tua yang telah berusia lanjut memiliki sifat kekanak-kanakan kembali, seperti suka *ngompol*, menangis, merengek-rengok minta ini minta itu, sehingga apabila anggota keluarga tidak memiliki sifat sabar maka akan sering menimbulkan percek-cokan dan akhirnya merasa bosan merawatnya. Bagi keluarga yang tergolong mampu biasanya akan menitipkan orangtua mereka kepada panti terdekat untuk dirawat sebagaimana mestinya dengan sistem penggajian setiap bulan.

Untuk warga masyarakat Desa Baramamase yang termasuk dalam kategori penyandang cacat ada sebanyak 12 orang (4,08 persen), baik cacat secara fisik maupun mental. Sampai saat ini masalah penyandang cacat belum tersentuh dari pihak terkait baik itu dari pemerintah daerah maupun pusat. Di lingkungan Desa Baramamase, belum ada panti baik pemerintah maupun swasta yang dapat menampung para penyandang cacat ini, dengan demikian mereka menjadi tanggung jawab dari masing-masing keluarga penyandang. Kadang-kadang dengan adanya anggota keluarga sebagai penyandang cacat merasa terbebani karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi apa boleh buat karena kondisi keluarga yang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-haripun kurang, sehingga mereka merawatnya menurut kemampuan keluarga.

Atas dasar pengertian mengenai keluarga fakir miskin, berdasarkan hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa Desa Baramamase terdapat 76 keluarga (25,85 persen) dikatego-

rikan sebagai keluarga fakir miskin. Sebagian besar mereka tergolong keluarga yang berpenghasilan rendah, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan termasuk berada di bawah garis kemiskinan.

Sebagai salah satu ciri daripada keluarga fakir miskin adalah tingkat pendidikan relatif rendah, serta tidak memiliki keterampilan tambahan. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan warga Desa Baramamase, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar (61,80 persen) atau sebanyak 466 orang tidak sekolah, 187 orang (24,80 persen) berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 68 orang (9,02 persen) berpendidikan SMP, 18 orang (2,39 persen) berpendidikan SMA, 14 orang (1,86 persen) berpendidikan Diploma III, dan sebanyak 1 orang (0,13 persen) berpendidikan Diploma IV (S1). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar warga Desa Baramamase tidak berpendidikan ataupun hanya berpendidikan rendah (tingkat SD), dan hanya sebagian kecil saja yang dapat mengenyam tingkat pendidikan sampai di atas sekolah lanjutan atas.

Jenis pekerjaan yang diperoleh seseorang tergantung pada tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang berhasil mereka selesaikan, jika berbekal pendidikan yang dipandang cukup maka akan diperoleh jenis pekerjaan yang sifatnya menggunakan daya pikir, dan apabila hanya berbekal pendidikan rendah maka akan diperoleh jenis pekerjaan yang sifatnya hanya menggunakan "*oko*" (Jawa) atau hanya berdasarkan otot tenaga belaka.

Sebagian besar penduduk Desa Baramamase juga tidak dibekali dengan kepemilikan keterampilan, padahal ada tuntutan untuk memiliki tingkat pendidikan yang mencukupi di samping kepemilikan keterampilan secara memadai pula. Dengan berbekal satu jenis atau apabila memungkinkan berbagai keterampilan secara memadai, seperti komputer, bahasa asing (Inggris), montir (motor dan mobil), elektronik, teknisi, penguasaan informasi dan teknologi, serta berbagai keterampilan yang lain secara otomatis akan memiliki nilai plus (lebih) dibandingkan hanya sekedar memiliki (ijazah) tingkat pendidikan secara memadai. Dengan berbekal tingkat pendidikan dan keterampilan

secara mencukupi, dapat dipastikan memperoleh jenis pekerjaan dan dengan sendirinya akan memperoleh penghasilan yang dapat menjamin kehidupan keluarga yang lebih baik dan menjanjikan di masa mendatang.

Kondisi keluarga fakir miskin tidak terlepas adanya derajat kesehatan dan gizi keluarga yang rendah. Karena kondisi miskin, sebagian besar warga Desa Baramamase kurang memperhatikan faktor kesehatan baik terhadap anggota keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit, sebagian besar diupayakan hanya dengan diberi obat-obatan (ramuan dari dedaunan) yang terdapat di sekitar rumah ataupun obat (produksi pabrik) yang dibeli di warung terdekat. Jarang sekali mereka memeriksakan ke puskesmas, rumah sakit, ataupun bahkan dokter karena terbentur biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan kesehatan. Dalam bidang gizi, keluarga miskin pada umumnya juga rendah, sehingga dalam memberikan asupan gizi secara baik kurang diperhatikan.

Apabila dilihat dari kepemilikan harta, keluarga fakir miskin pada umumnya memiliki harta terbatas, baik dari segi jumlah maupun nilainya. Kepemilikan harta ini sebatas hanya untuk keperluan sehari-hari yang sangat urgen dan dibutuhkan (kebutuhan primer), seperti alat rumahtangga dan perabotan rumahtangga, sedangkan untuk kebutuhan sekunder seperti: radio, TV, sepeda motor, HP, arloji, kulkas, dan yang lainnya belum dapat terpenuhi.

Dalam bidang hubungan sosial antar anggota masyarakat lingkup desa masih termasuk kategori terbatas, sehingga belum banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Pada umumnya keluarga miskin akan selalu membatasi diri dalam pergaulan sehari-hari di lingkungannya, hal ini disebabkan karena merasa malu terhadap lingkungannya dengan kondisi yang dia alami. Ciri khas dari keluarga fakir miskin di daerah tertinggal adalah adanya keterbatasan akses informasi, bahkan tidak mengenal adanya teknologi informasi yang sekarang sudah dapat dikatakan cukup maju. Karena kondisi miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membeli peralatan komunikasi yang seharusnya diperlukan sehingga tidak tertinggal terhadap in-

formasi penting, seperti: televisi, radio, telepon, surat kabar, dan internet.

Data pada tabel 4 menunjukkan, bahwa sebagian besar (30,95 persen) atau sebanyak 91 keluarga berumah tak layak huni. Kondisi rumah tak layak huni di Desa Baramamase sebagian besar hanya menempati rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari 25 m² dan tidak ada pembagian ruang, karena daerah ini merupakan langganan terkena bencana banjir, sehingga air untuk keperluan sehari-hari pun kurang bersih dan sehat berwarna kecoklatan. Apabila digunakan untuk air minum, air tersebut harus melalui pengendapan terlebih dahulu agar kotoran dapat terpisahkan, sehingga air dapat diminum walaupun harus dimasak terlebih dahulu. Sebagian besar keluarga yang menempati rumah tak layak huni tidak memiliki akses untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK). Biasanya mereka menggunakan sarana sungai sebagai satu-satunya untuk melakukan aktivitas mandi, mencuci, dan membuang air besar, sehingga dapat dikategorikan hidup tidak sehat. Dengan demikian air sungai akan terkontaminasi dengan kotoran manusia, sehingga tidak baik untuk kesehatan. Belum ada perhatian ataupun bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengadaan sarana MCK secara memadai.

Sebagian besar rumah tak layak huni dibangun secara tidak permanen, dinding terbuat dari papan atau bambu dan atapnya terbuat dari rumbia. Warga yang dianggap mampu atau golongan ekonomi menengah ke atas, pada umumnya memiliki rumah berlantai ubin/keramik, berdinding batu, dan beratapkan seng. Tetapi bagi warga tidak mampu, dalam membangun rumah tidak memperhatikan segi kenyamanan dan kesehatan. Hal ini sering dijumpai adanya rumah yang tidak memiliki pencahayaan matahari, karena rumah dibangun tidak memiliki ventilasi udara sehingga gelap dan pengap. Rumah tak layak huni sebagian besar hanya berlantai tanah, dengan tanpa pencahayaan sinar matahari dan tanpa ventilasi udara, sehingga kondisi udara di dalam rumah terasa lembab dan pengap, tidak layak dan sehat untuk dihuni, letak rumah tidak teratur dan terkesan berdempetan, yang secara kesehatan tidak baik.

Beberapa rumah tidak layak yang dihuni oleh keluarga kategori cukup mampu karena memiliki sepeda motor, televisi, sepeda, dan perabotan rumah yang cukup, tetapi setelah diklarifikasi ternyata mereka menempati tanah yang masih dalam status sengketa, sehingga tidak mau berspekulasi membangun rumah yang lebih layak. Mereka merasa khawatir apabila sewaktu-waktu dilakukan penggusuran oleh pihak yang berwajib akan mengalami banyak kerugian, karena hal ini pernah terjadi di tempat lain dengan kasus yang sama.

Berbagai permasalahan selalu muncul pada rumah tak layak huni, di samping kondisi rumah yang tidak sehat, juga kondisi lingkungan yang tidak mendukung, antara lain selalu terlihat kumuh dan becek kalau hujan turun, disebabkan saluran pembuangan air yang tidak memenuhi standar sehingga terhambat sampai pada pembuangan akhir. Jalan lingkungan ataupun jalan setapak selalu terlihat becek, kotor, dan tidak teratur. Rumah tidak layak huni merupakan cerminan dari kondisi keluarga yang sebagian besar penghuninya merupakan golongan keluarga tidak mampu atau miskin. Pada umumnya keluarga ini tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya bekerja serabutan, mereka bekerja apabila ada orang lain atau tetangga minta bantuan untuk mengerjakan sesuatu. Ada juga yang bekerja di sektor informal, seperti jual makanan dan minuman, buruh baik sebagai buruh tani maupun bangunan. Kehidupan mereka lebih terfokus pada mencari penghasilan yang dapat menghidupi keluarganya, sehingga kesadaran memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah.

Desa Baramamase termasuk daerah yang rawan terhadap bencana alam (terutama bencana alam banjir) karena terletak di daerah pertemuan dua sungai, Batang yang berhulu di sungai Batusitanduk dan anak sungai Jembatan Miring yang membelah Desa Baramamase dan memotong jalan Trans Sulawesi. Pada musim hujan, desa ini tidak lepas dari bencana banjir yang dapat menghanyutkan pertanahan dan rumah penduduk. Kadangkala di daerah ini tidak hujan, tetapi dalam sekejap terjadi banjir karena di daerah hulu sungai terjadi hujan lebat dan terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat tidak

siap menghadapi. Tabel 4 menunjukkan bahwa warga masyarakat Desa Baramamase seringkali menjadi korban bencana alam, banjir sebanyak 43 kepala keluarga (14,64 persen), baik dalam kondisi rusak (berat dan ringan) maupun hanyut terkena derasnya air sungai. Sebagian besar tanah yang hanyut berupa tanah pertanian dan pekarangan, banyak para petani mengalami kerugian yang tidak sedikit karena mengalami gagal panen.

Bencana banjir sebagian besar melanda dua kabupaten dan kota, salah satunya terjadi pada tanggal 19 Agustus 2010 pada hari Kamis sekitar jam 00.30 WITA, melanda 10 desa di wilayah Kecamatan Walenrang-Lamasi (Walmas) Kabupaten Luwu, dan lima kelurahan di wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Paling parah korban banjir melanda di Kabupaten Luwu, ada wilayah yang ketinggian banjirnya mencapai dua meter lebih, yakni di Pasar Karetan ketinggian air sampai melewati pintu rumah dan hampir mencapai atap rumah, dan ada sebagian rumah yang tinggal atap rumahnya. Air yang menerjang rumah penduduk merupakan luapan air dari sungai Jembatan Miring yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Luwu bagian utara, karena pada saat yang bersamaan sampai Jembatan Miring meluap dengan ketinggian diperkirakan enam meter.

Selain merendam rumah, air juga merendam ratusan hektar persawahan dan perkebunan kakau milik warga, sehingga petani menderita kerugian ratusan juta rupiah, sebab sawah dan areal perkebunan sudah siap-siap dipanen tetapi tiba-tiba terkena bencana alam banjir. Terdapat dua kelurahan di Kecamatan Walenrang, yakni Desa Tambang dan Baramamase, dilaporkan 75 rumah tenggelam dengan ketinggian air di atas lima meter. Air yang merendam rumah penduduk merupakan kiriman dari Sungai Batusitanduk yang masuk ke sungai kecil hingga meluap dan menerobos rumah warga Desa Tambang dan Baramamase, mereka hanya bisa makan indomie rebus. Selain melanda dua desa di atas, banjir juga menerjang rumah penduduk di 10 desa lainnya, kalau ditaksir kerugian sementara mencapai 1 milyar rupiah, air di dalam rumah warga rata-rata setinggi pinggang orang dewasa. Penyebab utama banjir dikarenakan

debit air sungai Batusitanduk tidak mampu menampung air kiriman dari Walenrang-Lamasi (Walmas), sehingga air sungai yang ada di masing-masing desa tidak mampu menampung dan menyebabkan air dengan mudah masuk ke rumah penduduk.

3. Upaya Penanganan

Dari kesembilan permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi warga Desa Baramamase, dalam melakukan penanganan diutamakan melalui skala prioritas dalam bentuk program kerja, yaitu lima permasalahan sosial yang secara kuantitas paling banyak dihadapi warga. Kelima permasalahan sosial tersebut meliputi rumah tak layak huni, keluarga fakir miskin, korban bencana alam (banjir), wanita rawan sosial ekonomi, dan anak terlantar. Sebagai program kerja yang telah berhasil disusun untuk mengatasi permasalahan rumah tak layak huni, yaitu dengan membuat dan menyediakan tempat MCK (mandi, cuci, dan kakus) yang dapat dipergunakan oleh semua warga, warga Desa Baramamase tidak lagi memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk mandi, mencuci, dan buang air besar karena dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil musyawarah desa, diambil beberapa keputusan, salah satu kesepakatannya yaitu mengadakan kegiatan kerjabakti yang dilakukan secara rutin setiap bulan, dengan harapan tercipta lingkungan yang sehat dan bersih.

Sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan atau solusi terhadap keluarga fakir miskin, yaitu dengan adanya program kerja pemberdayaan keluarga melalui usaha ekonomi produktif. Setiap keluarga dapat menciptakan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan penghasilannya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga setiap hari. Dalam hal ini peran dari instansi terkait sangat dibutuhkan, seperti dinas sosial, tenaga kerja, perindustrian, dan aparat desa dalam memberi wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang usaha ekonomi-produktif.

Sebagai rasa simpati kepada warga yang sedang mengalami musibah bencana (terutama banjir), warga secara sukarela membantu

memperbaiki rumah yang dilakukan secara bergotong royong. Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan baik yang berkategori berat maupun ringan, aparat setempat dibantu warga membantu meringankan beban korban bencana banjir dengan memberikan barang bahan material yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: papan kayu, semen, batako, batu merah, dan lain-lainnya. Kegiatan gotong royong yang dilakukan secara rutin oleh warga ini selalu ada setiap tahun, karena daerah ini merupakan salah satu langganan banjir setiap musim penghujan. Meskipun daerah langganan banjir, tetapi masyarakat setempat tidak mau kalau diungsikan atau direlokasi ke tempat lain yang dirasa lebih aman, karena merupakan tempat/ daerah peninggalan dari para leluhurnya dan tanah kelahirannya.

Agar wanita rawan sosial ekonomi dapat melakukan usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka diperlukan modal yang dapat dimanfaatkan sebagai lapangan usaha sesuai dengan kemampuannya secara maksimal. Oleh karena itu, wanita rawan sosial ekonomi diberikan modal usaha yang sifatnya lunak (bunga ringan atau tanpa bunga), ataupun pemberian modal secara bergulir yang pada suatu saat dapat digulirkan kepada orang lain yang dipandang masih memerlukan modal usaha. Di samping itu, dilibatkan pada kegiatan dalam bentuk kelompok usaha bersama (Kube), yaitu usaha yang dikelola secara kelompok dan hasil ataupun keuntungannya dibagi secara bersama-sama.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, di tangan merekalah maju dan mundurnya suatu bangsa dimasa depan bergantung. Oleh karena itu, agar permasalahan anak terlantar ini teratasi yaitu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, maka perlu dibantu dengan pemberian asupan gizi yang baik sesuai dengan masa pertumbuhan anak. Gizi yang baik tidak harus dengan mengeluarkan biaya yang tinggi, tetapi cukup dengan asupan makanan yang sangat dibutuhkan oleh perkembangan dan pertumbuhan anak, hal ini dapat diperoleh melalui berbagai tanaman yang ada di lingkungan rumah. Di samping itu, dilakukan pemberdayaan terhadap

anak terlantar melalui pemberian pendidikan dan keterampilan yang dapat dipakai sebagai bekal kemampuan mencari lapangan pekerjaan untuk menghadapi kehidupan dimasa mendatang.

E. Penutup

Desa Baramamase dapat dideskripsikan sebagai salah satu daerah yang dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal, dimana memiliki penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) cukup banyak baik secara kualitas maupun kuantitas, tetapi tidak sebanding dengan kondisi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada. Jenis penyandang masalah lebih banyak menggambarkan kondisi, bahwa di daerah tersebut faktor kemiskinan yang paling dominan.

Jenis masalah sosial yang ada di Desa Baramamase meliputi: rumah tak layak huni sebanyak 91 rumah (30,95 persen), keluarga fakir miskin 76 keluarga (25,85 persen), korban bencana alam (banjir) 43 keluarga (14,64 persen), wanita rawan sosial ekonomi 31 orang (10,54 persen), anak terlantar 18 anak (6,12 persen), lanjut usia terlantar 13 orang (4,42 persen), penyandang cacat 12 orang (4,08 persen), dan yang lainnya yaitu balita terlantar serta anak nakal masing-masing sebesar 1,70 persen.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yang dilakukan oleh aparat desa bersama warga setempat, yaitu rumah tak layak huni penanganannya dengan menyediakan tempat MCK (mandi, cuci, dan kakus) yang dapat dipergunakan oleh semua warga. Warga sepakat untuk mengadakan kegiatan kerja bakti yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Bagi keluarga fakir miskin, dengan melakukan pemberdayaan keluarga melalui usaha ekonomi produktif. Sebagai rasa simpati kepada warga yang sedang mengalami musibah bencana banjir, warga setempat secara sukarela membantu memperbaiki rumah yang dilakukan secara bergotong royong, agar wanita rawan sosial ekonomi dapat melakukan usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan, perlu dengan dibantu modal usaha yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, perlu dibantu dengan pemberian asupan gizi

yang sesuai dengan masa pertumbuhan anak, juga pemberdayaan melalui pemberian pendidikan dan keterampilan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang.

Dalam upaya penanganan masalah sosial di daerah yang dikategorikan tertinggal, diperlukan peran dan partisipasi dari segala lapisan masyarakat, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun kelompok dalam membantu memecahkan permasalahan sosial tersebut. Pemerintah setempat hendaknya selalu berkomitmen untuk membantu pada masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, dan penanganannya diharapkan selalu menjalin kerjasama dengan lembaga lain, karena tanpa bantuan dari berbagai pihak pemerintah setempat tidak dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat secara mandiri dan tuntas.

Pustaka Acuan

Novri.(2010). *Masalah Disparitas Pembangunan Desa-Kota*. Jakarta: SKH Sindo.

Soetomo.(1992). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM.

_____.(1995). *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Sugiyanto, (2007), *Lembaga Sosial*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Suharsimi Arikunto, (1992), *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno Hadi. (1983). *Statistik II*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM:

(2008). *Profil Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pusdatin, Departemen Sosial RI

(2011). *Monografi Desa Baramamase*.Dokumen Desa.

(2010). *Sulawesi Selatan Dalam Angka*. Makassar: Bappeda, Provinsi Sulawesi Selatan

(2011). *Daerah Tertinggal (Daftar 183 Kabupaten Tertinggal di Indonesia)*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

(2007), *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Pusdatin, Departemen Sosial RI.

Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 dan 183 *Daerah (kabupaten) tertinggal sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014*.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06B/HUK/2010 *tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 100 desa pada 50 Kabupaten Daerah Tertinggal*.